



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI I DPR-RI (BIDANG: PERTAHANAN, LUAR NEGERI, TENTARA NASIONAL INDONESIA, MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, BADAN INTELIJEN NEGARA, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA, DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA)

Tahun Sidang : 2005-2006
Masa Persidangan : IV
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Kepala Staf TNI Angkatan Udara
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Senin, 5 Juni 2006
Waktu : Pukul 09.00 WIB
Pimpinan Rapat : Drs. Theo L. Sambuaga
Sekretaris Rapat : Dra. Damayanti
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR-RI
Acara : 1. Pembukaan oleh Ketua Rapat
2. Penjelasan oleh KASAU
3. Tanya Jawab
4. Penutup
Hadir : 44 orang Anggota dari 49 orang Anggota Komisi I DPR RI
Pemerintah : Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsekal TNI Herman Prayitno beserta jajarannya

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsekal TNI Herman Prayitno pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2006 dengan waktu dan acara sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI, Drs. Theo L. Sambuaga dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Kebijakan *Minimum Essential Force* yang dikeluarkan Dephan adalah sebagai konsekuensi dan upaya penyesuaian kebutuhan pertahanan dengan budget yang masih terbatas. Dalam hubungan ini Komisi I DPR RI menghargai inisiatif KASAU yang telah menyusun rencana pembangunan postur TNI 2005-2024 dan minta agar di dalamnya tercakup peningkatan profesionalisme dan kemampuan *intercept* dan *surveillance* serta tetap disinkronisasikan dengan Angkatan lainnya dan dikoordinasikan dengan Mabes TNI dan Dephan.
2. Komisi I DPR RI minta agar dalam perencanaan pengadaan Alutsista supaya KASAU mempertimbangkan pengadaan dari negara-negara lain dan tidak bertumpu pada satu atau dua negara saja, dengan tetap berpegang pada tawaran alutsista yang sesuai dengan kebutuhan pertahanan, kualitas yang memadai, dan harga yang bersaing, dan

delivery yang tepat, serta dukungan fasilitas kredit keuangan dari negara yang menawarkannya.

3. Sehubungan dengan masih minimnya anggaran TNI termasuk anggaran TNI AU, Komisi I DPR RI minta agar KASAU mempertajam skala prioritas terutama yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan prajurit, kemampuan TNI melalui peningkatan profesionalisme, serta *repowering* alutsista disamping pembelian alutsista baru yang disadari sangat mahal harganya.
4. Pencabutan embargo militer AS belum diikuti dengan pengeluaran *export license* serta ketentuan-ketentuan lain yang diperlukan sebagai syarat pembelian alutsista. Oleh karena itu, Komisi I DPR RI minta agar Pemerintah khususnya Departemen Pertahanan meningkatkan upaya agar *export license* dan ketentuan-ketentuan terkait lainnya secepatnya dikeluarkan, serta kepada KASAU agar pencabutan embargo ini benar-benar bisa dimanfaatkan sesuai dengan pertimbangan dan kebutuhan alutsista serta kemampuan TNI AU.
5. Hingga kini upaya penertiban sejumlah aset TNI AU terutama tanah dan rumah dinas, termasuk rumah dinas yang ditempati oleh para purnawirawan, masih perlu terus ditingkatkan. Komisi I DPR RI mendukung dan minta agar upaya penertiban yang mengutamakan proses hukum agar ada kepastian hukum, serta terus dilakukan berdasarkan pendekatan dialog dengan para purnawirawan.
6. Peristiwa penangkapan para rekanan TNI AU oleh Pemerintah Amerika Serikat belum lama ini harus menjadi pengalaman berharga. Dalam hubungan ini, Komisi I DPR RI minta agar KASAU lebih selektif dan ketat dalam menentukan rekanan untuk pengadaan alutsista, dan membuat mekanisme dan sistem penentuan rekanan, serta proses penentuan pemenang pengadaan barang dan jasa secara transparan dan akuntabel.
7. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas operasi pertahanan udara, Komisi I DPR RI mendukung upaya KASAU agar TNI AU memperoleh akses langsung dan cepat kepada Presiden yang memiliki wewenang komando pengendalian pertahanan udara terutama dalam hal instruksi pengambilan keputusan penindakan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.50 WIB

KETUA RAPAT,

THEO L. SAMBUAGA